



**KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**H. Andi Depu, No. 147,  
Polewali Mandar, 91313**



**Telepon. 0428-21025  
Faks. 0428-22948**



# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2024, Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya, Karenasegala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.



KEPALA DINAS,

**H. AZWAR JASIN, S. Sos., M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19730711 199203 1 001





# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

LATAR BELAKANG  
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## **BAB II PERENCANAAN KERJA**

A. RENCANA STRATEGIS  
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024  
C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2024

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGANA RENCANA STRATEGIS**

A. AKUNTABILITAS KINERJA  
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

## **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN  
B. LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN

## **LAMPIRAN**

> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
> PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
> REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

> POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH 2024  
> LAPORAN MONEV RENCANA AKSI 2024  
> EVALUASI INTERNAL TAHUN 2024

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas sekretariat daerah merupakan perwujudan kewajiban sekretariat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sekretariat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Guna mendorong Good Governance dikalangan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan pada pemberian otonomi secara penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota telah diawali dengan penataan organisasi pemerintahan kabupaten dengan membentuk Badan, Dinas dan kantor.

### 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar sebagai Pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasasarn Program yang wajib dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial 2019-2024 dan dokumen penetapan kinerja

Tujuan :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai



- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.

### **3. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan AKIP ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2025
- i. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 tahun 2012 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- j. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
- k. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- l. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 tahun 2017 tentang kedudukan, organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar.

### **B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang sosial, dan kesejahteraan sosial;

- d. Pelayanan umum dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### Tugas pokok dan fungsi

	Tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Dinas
Tugas Pokok	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan</li> <li>b. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi koordinasi di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja</li> <li>c. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan</li> <li>d. mengevaluasi pembinaan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan</li> <li>e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas.</li> <li>f. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya.</li> <li>g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi dan tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Sekretaris
Tugas Pokok	merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan program yang meliputi: penyusunan program dan anggaran;</li> <li>b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;</li> <li>c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi: urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan;</li> <li>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi</li> </ul>
Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi : melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;</li> <li>b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;</li> <li>c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;</li> <li>d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;</li> </ul>

	<p>e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;</p> <p>f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.</p>
Jabatan	Sub bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sekretariat, khususnya mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan dan khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan.
Fungsi	<p>a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas;</p> <p>b. Pelaksanaan pelaporan anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan;</p> <p>c. Penyusunan laporan terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;</p> <p>d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran;</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p> <p>f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;</p> <p>g. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;</p> <p>h. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas termasuk penyusunan neraca keuangan dinas;</p> <p>i. Pengelolaan administrasi keuangan lainnya;</p> <p>j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi</p>
Jabatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya di bidang pemberdayaan sosial, dan penanganan Fakir Miskin.
Fungsi	<p>a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>b. Penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>c. Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, bantuan Stimulan dan Penanganan Fakir Miskin
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan sosial, Bantuan Stimulan dan Penangan Fakir Miskin
Fungsi	<p>a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan penanganan fakir miskin;</p> <p>b. Penyusunan Rencana Kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan Fakir Miskin;</p> <p>c. Pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat di lingkungan kumuh;</p> <p>d. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga, KAT;</p>



	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan,member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyimpan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</li> <li>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</li> <li>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, khususnya dibidang bina kelembagaan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina kelembagaan sosial;</li> <li>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya;</li> <li>c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya;</li> <li>d. Pelaksanaan bimbingan teknis program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi</p>
Jabatan	a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;</li> <li>b. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan, advokasi sosial dan bantuan hukum;</li> <li>c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan jaminan sosial dalam bentuk asuransi/bantuan langsung berkelanjutan pada; fakir miskin, anak yatim piatu , terlantar, lansia dan penyandang cacat serta penderita penyakit kronis;</li> <li>d. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial ;</li> <li>e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.</p>
Jabatan	e. Kepala Seksi Perlindungan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang perlindungan sosial.

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan sosial;</li> <li>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bantuan sosial bencana alam;</li> <li>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam;</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Jaminan Sosial
Tugas Pokok	f. Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang bantuan dan jaminan sosial, khususnya dibidang jaminan kesejahteraan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang Rehabilitasi sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial;</li> <li>b. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial;</li> <li>c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang Rehabilitasi sosial ;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Rehabilitasi sosial;</li> <li>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Seksi Lansia dan Anak
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Sosial, Lansia dan Anak.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak;</li> <li>b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Anak;</li> <li>c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak dan lansia;</li> <li>d. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak viabilitas dan berkebutuhan khusus;</li> <li>e. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial pengangkatan Calon Orang Tua (COTA) dan Calon Anak Angkat (COA);</li> <li>f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;</li> <li>g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak dan lansia</li> </ul>

	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Jabatan	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti;</li> <li>b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti;</li> <li>c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, korban perdagangan orang;</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial dan bekas warga binaan;</li> <li>e. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza;</li> <li>f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;</li> <li>g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak dan lansia</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>



## Sumber Daya SKPD

Pegawai pada Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar terdiri dari:

Tabel Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	2	2	4
3.	IV	5	2	7
4.	Staf	5	4	9
Jumlah		13	8	21

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	0
2.	II	-	-	3
3.	III	10	7	17
4.	IV	3	1	4
Jumlah		13	8	21

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	0	-	0
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	-	1	1
4.	Sarjana Muda	0	0	0
5.	Strata 1 (S1)	7	6	13
6.	Strata 2 (S2)	6	1	7
Jumlah		13	8	21

## Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 50 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

Chart Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

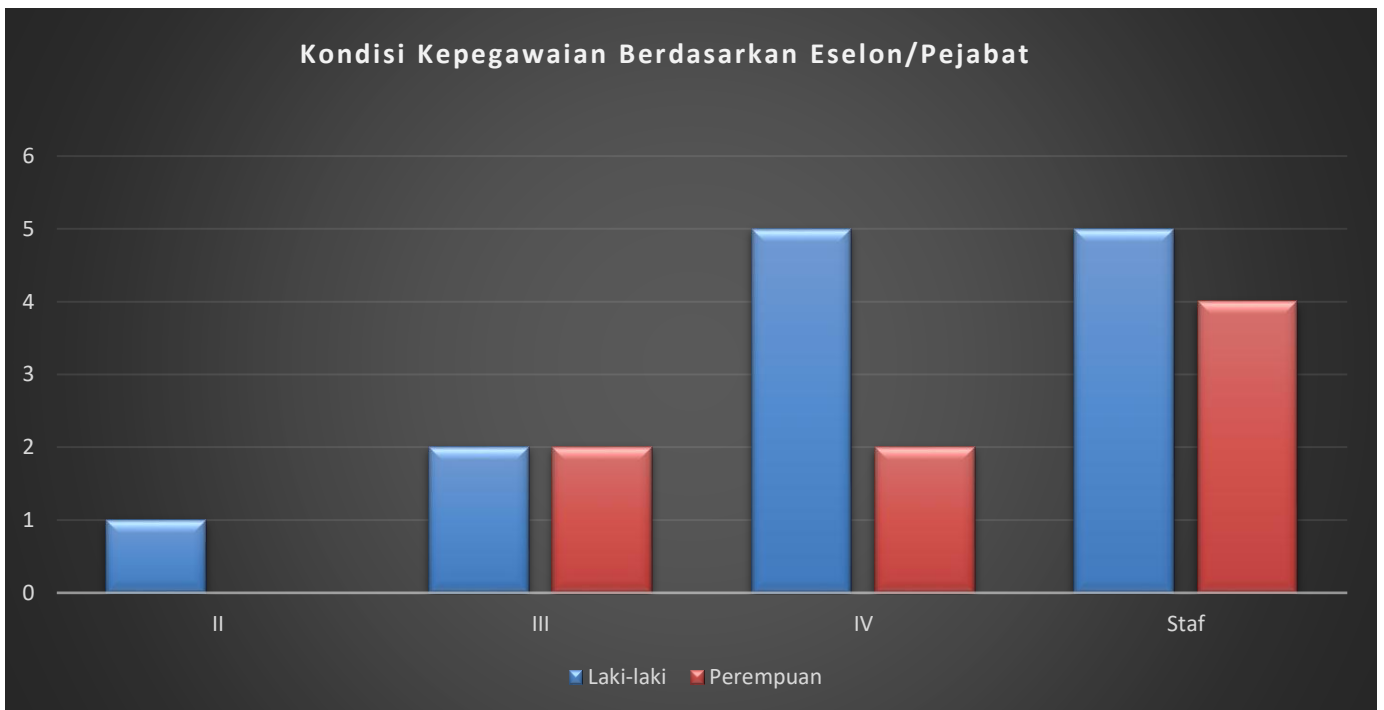
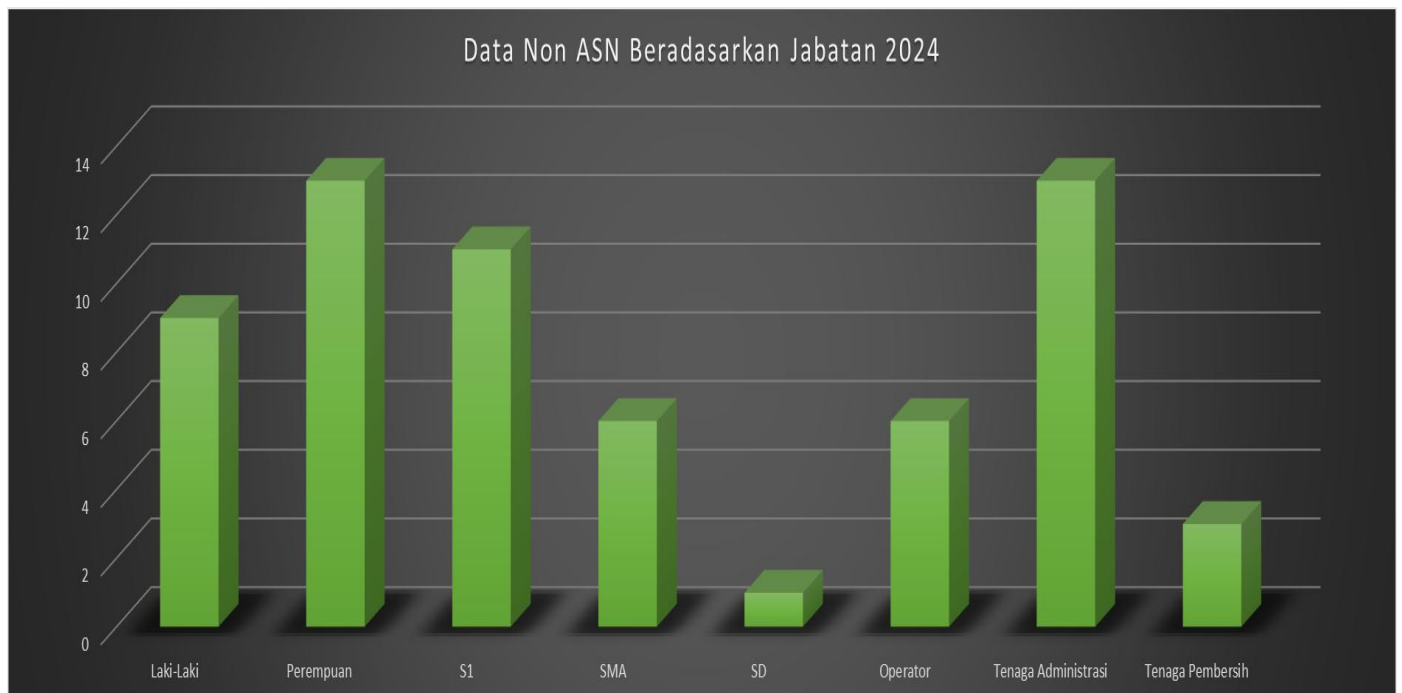


Chart Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan



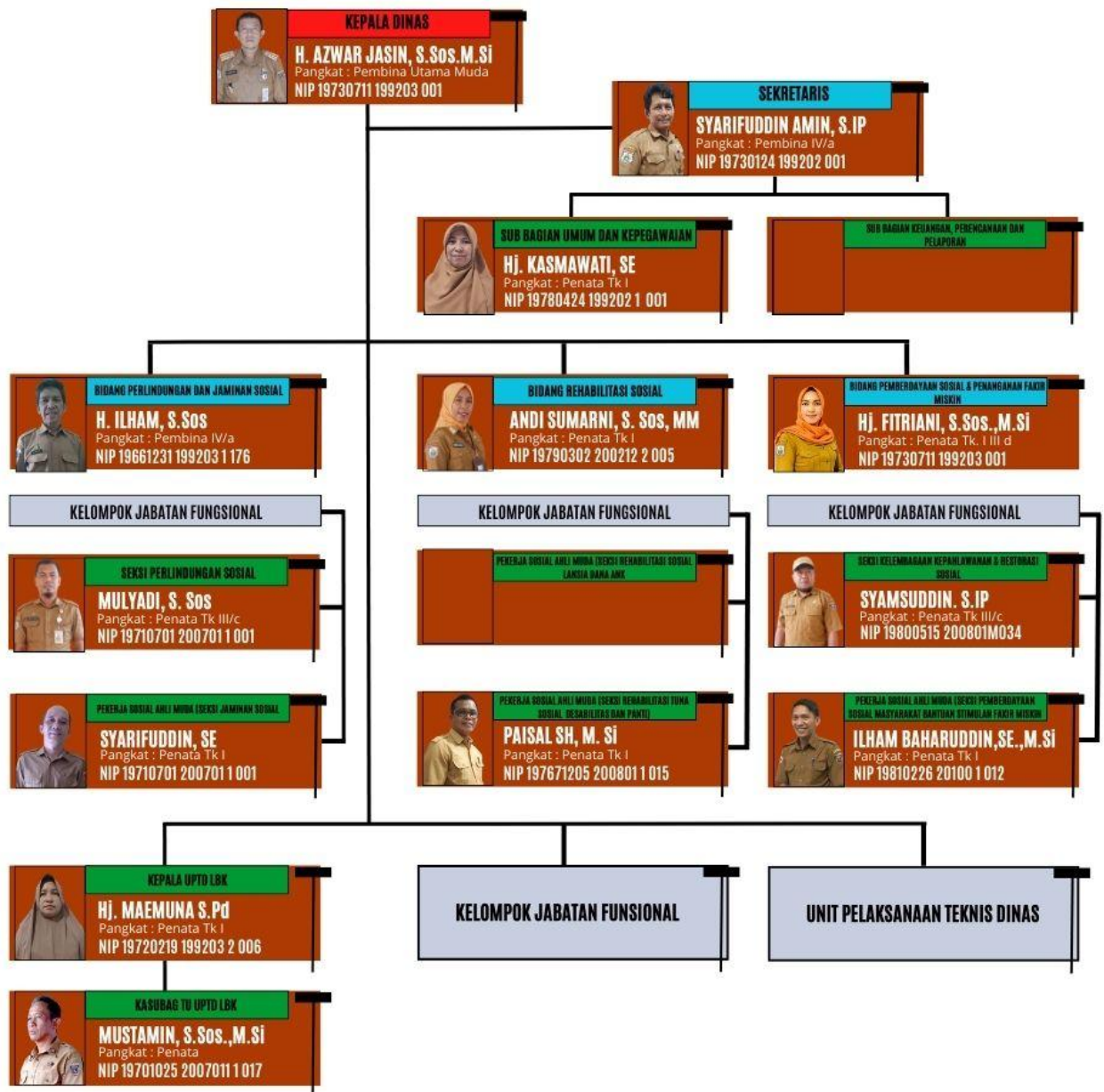


PEMERINTAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL POLEWALI MANDAR





Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 dan Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Dinas Tekhnis yang cukup padat dengan tanggung jawab yang besar dimana didalamnya ada 3 (tiga) bidang yang harus dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun setiap awal tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Sosial yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu dalam Penyusunan LAKIP ini tentu diawali dengan proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. Isu-isu Strategis yang dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
3. Terbatasnya aparatur teknis bidang social;
4. Peran SKPD lain kurang, terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan social;
5. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan social;
6. Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan social;
7. Belum optimalnya potensi dari sumber dari kesejahteraan social;
8. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar;
9. Masih banyaknya pemerlu masalah kesejahteraan sosial yang belum pernah tertangani;

10. Belum adanya tempat untuk menampung dan memberikan rehabilitasi hasil Razia;
11. Masih kurangnya kesadaran dari pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial masalah kesejahteraan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga sering terjadi penolakan terhadap pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah;
12. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan social;
13. Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PPKS terutama untuk lansia terlantar, gelandangan, dan pengemis;
14. Terbatasnya tenaga terlatih di bidang kesejahteraan sosial yang terampil dalam menangani (Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial) di lapangan;

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019–2024 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul.

### B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

- a. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 berdasarkan capaian sasaran strategis ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	TARGET 2024
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	1	42,82%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	1	36,05%
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	1	21,00%
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	1	71,43%



6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	1	100%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	3	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah		100.00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah		Sangat Baik

**b. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024**

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	42,82%
			Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	36,05%
			Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	21,00%
			Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71,43%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik

	pelayanan publik		pelayanan publik		
			Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A
				Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%
				Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik

### c. Instrumen Pendukung Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah diharapkan mampu menyaring Data Layak dan Tidak Layak atau lebih familiar dengan istilah Inclusion dan Exclusion Error, aplikasi ini berupa menu isian pemutakhiran yang mencakup data keluarga miskin, data anggota keluarga, pekerjaan serta data yang bersifat pribadi lainnya. serta berisi jenis Program Bantuan yang diterima.

Pengelolaan sistem Jaminan Sosial juga tercakup di sub kegiatan Pengelolaan data kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota, seiring dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial. Tahun 2024 target capaian yang ditetapkan adalah 71.43% seiring dengan dilaksanakannya verifikasi data kependudukan melalui basis data Nomor Induk kependudukan (NIK) bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) .



Kecamatan

Kelurahan/Desa

21 JANUARI 2025

KAB. POLEWALI MANDAR  
WILAYAH281.096  
JUMLAH INDIVIDU95.692  
JUMLAH KELUARGA598  
PERLU PERBAIKAN

KAB. POLEWALI MANDAR

Unduh Rekap KAB. POLEWALI MANDAR

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah di bidang sosial melaksanakan kewajiban ber-akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dan dari hasil Pengukuran Kinerja tahun 2024 Indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dapat dinyatakan Indikator sangat berhasil dan Berhasil yaitu pada indikator 5,6 dan 7 terkategori sangat baik.

### A. AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	KATEGORI
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	42,82%	58,57%	Baik
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	36,05%	84,05%	Baik
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	21,00%	0 %	Cukup Baik
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71,43%	91,74%	Sangat Baik



6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%	Sangat Baik
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	BB	Baik
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	100.00%	Sangat Baik
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

**Keterangan : 0 sd 50 % = cukup baik, 50 s.d 100 % =Baik, > 100% Sangat Baik**

$$\text{indeks Ketahanan Sosial} = \frac{\text{persentase Capaian (Rehabilitasi Sosial + Pemberdayaan Sosial + Perlindungan dan Jaminan Sosial)}}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{84,05 + 0 + 91,74}{3} \times 100\%$$

$$= \mathbf{58,57\% \text{ (capaian tahun 2024)}}$$

## TUJUAN 1

### MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

## SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024
1.	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	36,05 %

Dinas Sosial, indikator sasaran merupakan komposit dari indikator Kinerja Program. Ditahun 2024 target output disetiap kegiatan telah dimaksimalkan pencapaiannya , program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di Bidang rehabilitasi Sosial ini diharapkan mampu memperkuat peran Dinas Sosial khususnya dalam penanganan Kelompok Rentan Lansia dan Anak serta Disabilitas, hal ini merupakan amanat **SPM WAJIB** bidang Sosial . Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS yang seharusnya rangkaian sub kegiatan Penjangkauan, Advokasi lalu Pelayanan kemudian Tahap Rehabilitasi belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi PMKS hanya mampu diimplementasikan berupa layanan sosial bagi Anak dalam Panti berupa penyediaan bantuan permakanan bagi Anak Terlantar. Panti yang mampu di beri layanan sosial dilakukan diluar Panti yang sebelumnya dilakukan bagi anak yg berada di dalam panti, hal ini akibat diberlakukannya/terbitnya permendagri Nomor 90 tahun 2019 dengan sasaran sejumlah 190 orang, yaitu jumlah jiwa yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 80 jiwa Lanjut Usia, 70 Anak dan 40 jiwa Disabilitas. Kelompok PMKS Disablitas ini membutuhkan penanganan khusus dan lengkap agar yang bersangkutan dapat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

Mengingat pentingnya Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan indikator Pencapaian SPM, Keterlantaran Kelompok Masyarakat Rentan yang mencakup Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar yang masih sangat minim dalam Penjangkauan Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial. Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memacu pencapaian pada sasaran strategis dimasa yang akan datang adalah;

### **HAMBATAN / TANTANGAN**

1. Masih Kurangnya kapasitas / Kapabilitas pelaksana Rehabilitasi
2. Layanan Pusat Rehabilitasi di tingkat Kabupaten belum ada
3. Ketersediaan Petugas yang berkompeten(Ahli psikologi) sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan anggaran
4. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan Rehabilitasi Sosial

### **SOLUSI**

1. Penyelarasan pandangan antar pelaksana / Penyedia Layanan dan Rehabilitasi Sosial tentang bagaimana Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial yang layak seharusnya dilaksanakan;
2. Penyediaan Pusat Rehabilitasi Sosial di tingkat Kabupaten
3. yang diharapkan menjangkau Kelompok Rentan khususnya di pelayanan tingkat awal terhadap masalah sosial;
4. Peningkatan Pagu Anggaran.

### **ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN**

- a. Ketersediaan SDM seperti PKSAI (Pekerja Sosial Anak) sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja Program/Kegiatan. Sikap profesionalisme dan pengabdian tanpa pamrih mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum sangat diapresiasi;
- b. Networking yang terbangun memudahkan penjangkauan bagi PMKS rentan, masyarakat yg mulai aktif serta peduli akan keadaan lingkungan sekitar sangat membantu penanganan kasus kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

### **ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)**

$$\begin{aligned}\text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ 100\% &= \frac{453.880.254}{471.299.454} \times 100\% \\ &= 100\% - 96.30\% \\ &= 3.7\%\end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis I ini sebesar 3.7% secara teori masih efektif dalam hal efisiensi.

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	37.08 %	38.00 %	36.05%	84.05%

Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan tahun 2024 diperoleh dengan rumus sebagai berikut ;

Dan ditahun 2024 jumlah PMKS yang ditangani untuk mendapatkan hasil dari persentase tersebut adalah 190 orang, yaitu jumlah jiwa yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 80 jiwa Lanjut Usia, 70 Anak dan 40 jiwa Disabilitas.

Jumlah Masyarakat Rentan ditangani yang diberi Pelayanan dan Rehabilitasi

Jumlah Total Masyarakat Rentan yang seharusnya ditangani

190

226

= 84.05%

X100%

X100%

Sasaran Strategis 1 (satu) yaitu **Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi** ini terdiri atas 1 (satu) Program pendukung yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Untuk meningkatkan capaian pada Sasaran Strategis ini Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan antaranya adalah Pelayanan dan Rehabilitasi bagi kelompok masyarakat rentan termasuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar serta Disabilitas.

Capaian Output Kegiatan Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						
Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis luar panti social (jiwa)</b>						
Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar gelandangan pengemis Masyarakat KP Napza lainnya bukan HIV/AIDS	50	0	55	25	30	40
Penyediaan Permakanan/ Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	42	25	90	60	60	150



Tabel 3.2  
Capaian Program / Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Penyediaan Permakanan	150 orang	150 orang	382,560,386	365,151,186	95.45
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	40 orang	40 orang	88,739,068	88,729,068	99.99

# Serba-serbi SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

## TARGET CAPAIAN

2024 = 36,05 %

sesuai Permensos No.09 Tahun 2018 tentang **STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) WAJIB BIDANG SOSIAL** terdiri atas ;

190 orang = 80 lansia + 70 anak + 4 disabilitas

(371-145 capaian 2021)

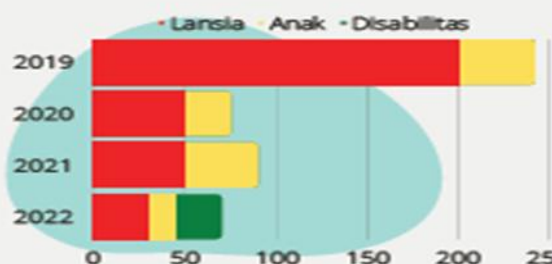


36,05 %

## Data Perbandingan

36,05 %

Perbandingan Capaian sasaran dengan Total PPKS Rentan kelompok Lansia, Anak dan Disabilitas



capaian kinerja output kegiatan yang sangat fluktuatif / sangat tergantung pada alokasi Pagu Anggaran yg terse'

## Dokumentasi



## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
2.	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71.43%

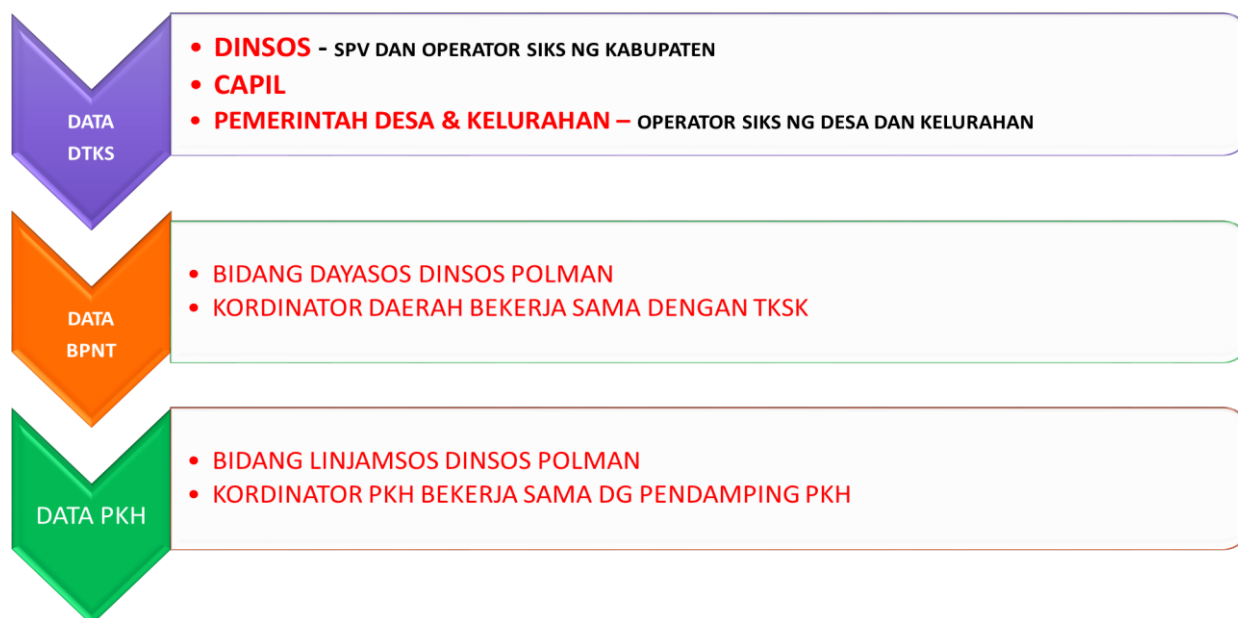
No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2022	2023	2024	
2	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71%	90.3%	71.43%	91.74%

**Tabel Capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2020-2024**

Capaian Output Kegiatan Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						
Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Penanggulangan Tanggap Darurat Korban Bencana	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kot sub kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	174 Jiwa	514 Jiwa	150 Paket	150 Paket	79 paket
Verifikasi DTKS		3.200 KM	87.814 KM	71.048 KM (150 KK bantuan logistic + 228 RTLH + 71.025 KK data Penerima bansos yang di verifikasi)	85.159 KM (19.645 KK bantuan beras + 7 6.340 KK data penerima bansos yang di verifikasi)	40.727 KK Penerima BPNT dan 24.685 bantuan PKH
Pemantauan Pelaksanaan Program PKH		20.099 KPM				
Pemantauan Pelaksanaan BPNT		36.079 KPM				
Bantuan Jaminan Permakanan (kebutuha dasar) bagi lansia terlantar dan Kelompok rentan lainnya		0				

Persentase Masyarakat miskin yang masuk dalam cakupan Penjaminan Sosial serta Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapatkan bantuan Logistik masuk dalam indikator ini dan bila dilihat dari tahun ke tahun 2020 s.d 2024 jumlahnya mengalami kenaikan, mengingat keluarga yang diberikan bantuan juga bertambah jumlahnya sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 91,74%.

$$\begin{array}{r}
 \text{Jumlah Warga Miskin yang} \\
 \text{menerima Perlindungan dan} \\
 \text{Jaminan Sosial} \\
 \hline
 \text{Jumlah Total Warga Miskin} \\
 \text{yang seharusnya menerima} \\
 \text{Perlindungan dan Jaminan} \\
 \text{Sosial} \\
 \hline
 65.491 \\
 \hline
 71390 \\
 \hline
 = 91,74 \%
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \times 100\% \\
 \\
 \times 100\%
 \end{array}$$



Program PKH dan BPNT adalah merupakan Program andalan Pemerintah yang diharapkan mampu menahan laju pertumbuhan angka kemiskinan dan merupakan Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, dimasa Pandemi dimana Pemerintah pusat menyalurkan berbagai mode Paket Bantuan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak pandemic Program ini menyasar Penduduk Miskin yang Datanya terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 24.685 KK merupakan penerima PKH dan 40.727 KK adalah penerima Bantuan Sembako, Bantuan Sosial dari Program ini diambil dari APBN sedangkan operasionalnya didapat dari sharing Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar. Kendala pelaksanaan kegiatan ini biasanya bersifat teknis operasional yang sangat berpengaruh pada pemutakhiran besaran bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berikut adalah tabel capaian persentase untuk Sasaran strategis kedua;

Tabel 3.3  
Capaian Program / Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	71.240 KK	95.599 KK	Rp. 444.786.208	Rp. 312.324.408	70.22%
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	150 Paket (bantuan logistik bencana)	79 paket	Rp. 2.362.362.277	Rp. 472.429.127	20.00%

Kegiatan Penanggulangan Bencana berupa Penyaluran Logistik bagi Korban Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Sosial, kesiapsiagaan dalam rangka Tanggap Darurat adalah hal mutlak, Dengan pengaktifan satuan siaga bencana (TAGANA) adalah salah satu upayanya. Dengan adanya TAGANA diharapkan resiko dan korban akibat bencana dapat diminimalisir, terkait kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar juga berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Pendataan dan penyalurannya dilaksanakan langsung oleh personil TAGANA dan personil Pekerja Sosial lainnya .

### HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Tingginya angka jumlah Masyarakat Miskin yang belum tercover Penjaminan Kesehatan
2. Belum tersedianya Data Valid Jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan Sosial
3. Masih adanya Tumpang Tindih perihal kewenangan Pengelolaan Logistik Bencana
4. Filtering Data Penerima Bantuan Sosial seperti Rastra dan PKH masih belum maksimal sehingga Data ganda masih didapati
5. Jumlah Eksclusion dan Inclusion Error Penerima PKH masih tinggi



## SOLUSI

1. Disarankan untuk melaksanakan koordinasi yg lebih intens kepada pihak Pemerintah Desa agar Validitas data yg akan menjadi dasar pengelolaan data di tingkat desa bisa lebih berkualitas.
2. Percepatan Verifikasi Validasi Data Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG perlu segera dilaksanakan
3. Maksimalisasi pelaksanaan Graduasi Mandiri kepesertaan PKH
4. Konsolidasi periodik bagi seluruh pendamping lapangan yang menangani Penyaluran Bantuan Sosial mutlak diperlukan

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Indikator pada level impact dan Outcome pada Sasaran Strategis ini umumnya bersifat Fisik (besaran Bantuan kepada masyarakat) serta pupulasi Data dan Penyaluran Logistik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya Penjaminan Sosial akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya .
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2025 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned}\text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ 100\% - &= \frac{784.753.535}{2.807.148.485} \times 100\% \\ &= 100\% - 27.95\% \\ &= 72.05\%\end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis II ini sebesar 99.57%.

# SERBA SERBI

SASARAN STRATEGIS 2  
Meningkatnya ketahanan sosial  
masyarakat miskin potensial



**DATA PENERIMA BANSOS 96  
DIVERIFIKASI**

**PENERIMA PKH  
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)  
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)**



### SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024
3.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	21.00

**Tabel Capaian Sasaran startegis 3 tahun 2021-2024**

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun			Target	Realisasi
			2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	14.28%	13.00%	20.08%	21.00%	0%

$$\begin{array}{l}
 \frac{\text{Jumlah Warga Miskin Potensial yg difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang Potensial seharusnya ditangani}} \times 100\% \\
 \frac{0}{157} \times 100\% \\
 0\%
 \end{array}$$

Tabel 3.4  
Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	3 lokasi	Rp. 8.462.080	Rp. 8,462,080	100.00
2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	40 kelompok	Rp. 19.934.308	Rp. 19.934.308	100.00
			Peningkatan kemampuan potensi sumber Peksos Masy kewenangan kab/kota	20 orang	Rp. 3.594	Rp. 0	0

Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin adalah Program yang menyasar PMKS terkategori Produktif / masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidak berdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik oleh lingkungan, keterpencilan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif. Contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi. Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa Puppuring (Kecamatan Alu), Desa Taramanu Tua dan Desa Taloba (Kecamatan Tutar). Tahun 2024 ditargetkan semua jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan. Sedangkan bagi Keluarga Miskin Potensial yang diberdayakan dengan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diharapkan mampu dijalankan dengan metode Bantuan Stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan tersebut dapat betul betul efektif.

Capaian Sasaran strategis Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024 mencapai 0 %. Hal ini disebabkan karna pagu anggaran pada program tersebut mengalami *Refocusing*.



## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran Masyarakat Miskin tentang pentingnya Bantuan Stimulan digulirkan secara terus menerus
2. Belum jelasnya Regulasi Pengalihan kewenangan Penerbitan Rekomendasi BPJS dimasa yang akan datang
3. Jumlah Keluarga Miskin yang layak memperoleh Bantuan Stimulan masih sangat tinggi dan terkonsentrasi di wilayah Pesisir
4. Akses ke lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih sangat minim baik itu akses Jalan maupun Akses Telekomunikasi
5. Pembinaan berkelanjutan belum dilaksanakan khususnya bagi Keluarga Miskin yang telah menerima bantuan stimulan

## SOLUSI

1. Pembinaan berupa Pendampingan kepada Masyarakat / Keluarga Miskin perihal pentingnya kemandirian secara ekonomi lebih di intensifkan
2. Penyaluran Bantuan di wilayah pesisir tempat terkonsentrasinya kantong-kantong kemiskinan untuk lebih diintensifkan
3. Regenerasi Pekerja Sosial khususnya TKSK segera dilakukan mengingat perkembangan masalah sosial di lapangan yang semakin beragam
4. Validasi Data PMKS khususnya bagi PMKS Potensial mutlak segera dilakukan agar tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan sosial

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{28.396.388}{28.399.982} \times 100\% \\ &= 100\% - 99,99\% \\ &= 0.01\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 0.01%. secara teori masih sangat efektif dalam hal efisiensi.



# SERBA SERBI

## SASARAN STRATEGIS 3

### Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

sasaran strategis 3 ini menyasar kelompok PPKS Potensial seperti Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Miskin Potensial yang memiliki usaha serta peningkatan kapasitas bagi PSKS khususnya Pekerja Sosial yg terlibat langsung dalam usaha Kesejahteraan Sosial



## TUJUAN 2

### Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

## SASARAN STRATEGIS 4

### Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
4	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%

**Tabel Capaian Sasaran startegis 4 tahun 2020-2023**

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2022	2023		2024
4	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%

2	
=	$\frac{2}{2} \times 100\%$
=	100%

Jumlah Lembaga/Wahana Kesos yang dibina	
=	$\frac{\text{Jumlah Lembaga/Wahana Kesos yang dibina}}{\text{Jumlah Total Jenis Lembaga Sosial yang seharusnya dibina dalam 1 tahun}} \times 100\%$





Tabel 3.5

Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota	2 lokasi	Rp. 24.212.000	Rp.24.212.000	100.00

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Luas nya areal yang harus dijaga kondisinya pad setiap pelaksanaan upacara/peringatan hari besar;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar serta kepedulian pemerinth setempat dalam menjaga situs/tempat bersejarah yg berada di wilayahnya
3. Intervensi pihak provinsi dan Pusat yg dinilai belum cukup berperan serta dalam membantu pelestarian situs/ tempat bersejarah

## SOLUSI

Adanya sinergi antar stakeholder masyarakat dan Pemerintah dalam ikut menjaga kelestarian situs/tempat bersejarah, pengenalam kepada generasi muda tentang arti penting semangat keperintisan dan kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial yang menjadi modal dasar keberlangsungan semangat nilai nilai nasionalisme yang seharusnya tertanam sedari dini

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

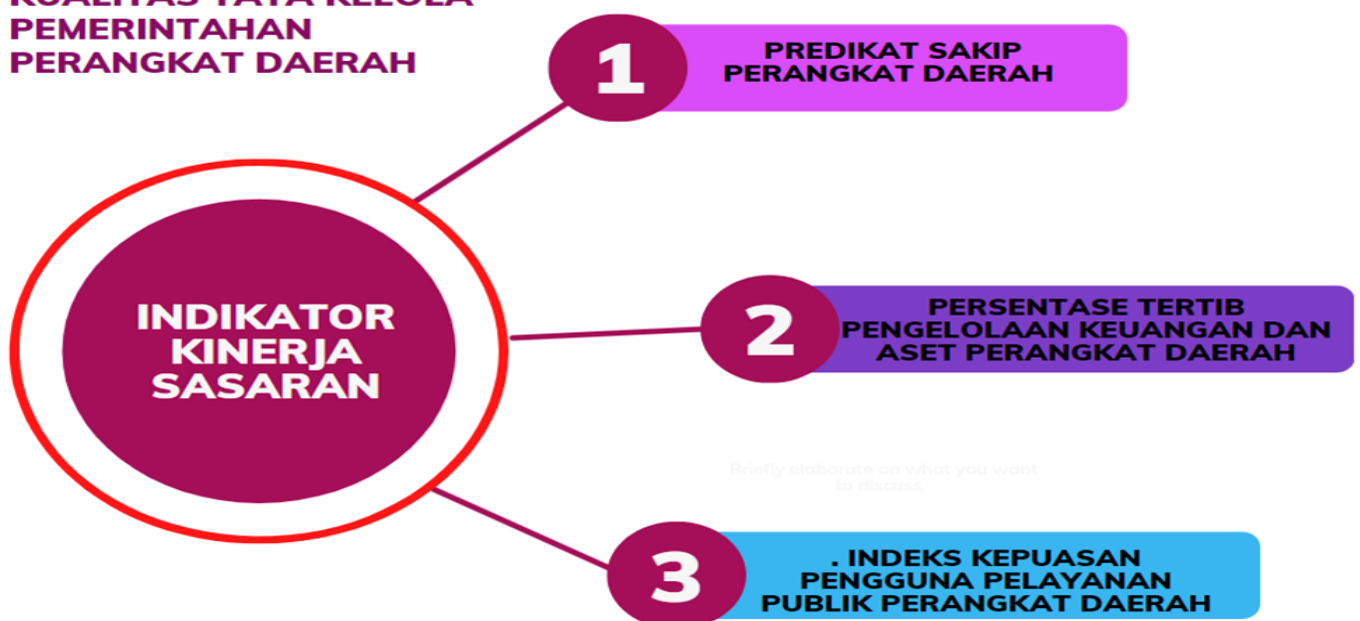
$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{24.212.00}{24.212.00} \times 100\% \\ &= 100\% - 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis IV ini sebesar 0.00% secara teori masih sangat efektif dalam hal efisiensi.

## SASARAN STRATEGIS 5 Indikator 1

Predikat SAKIP perangkat daerah

**MENINGKATNYA  
KUALITAS TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN  
PERANGKAT DAERAH**



Briefly elaborate on what you want to discuss.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	
		2. Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	98.76%
		3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat BB dari Inspektorat daerah Kabupaten Polewali Mandar. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

	Komponen Yang Dinilai	2023		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,80	30	28,80
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,63	25	20,63
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,51	15	11,51
d.	Evaluasi Internal	10	5,45	10	5,04
e.	Capaian Kinerja	20	12,50	20	12,50
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,88</b>	<b>100</b>	<b>78,47</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi



menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **78.88** atau memperoleh predikat rating "**BB**". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut,

Tabel 3.7

Program/Kegiatan yang mendukung **Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp	SISA
	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOMES)		K	Rp.	K	Rp.		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>2,068,090,360</b>		<b>2,020,508,510</b>	<b>97.70%</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	Jmh dok. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan		9,288,810		9,288,610	100.00%	200
Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah		Jmh Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		8,114,860		8,114,660	100.00%	200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jmh lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LHK peny. Lap. Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	1 Laporan		636,000		636,000	100.00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jmh lap. Evaluasi kinerja PD	1 Laporan		537,950		537,950	100.00%	

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran internal lingkungan Dinas Sosial tentang arti pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap kerja kerja yang dilaksanakan
2. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja serta komponen penilaian yang melekat didalamnya

## SOLUSI

Peningkatan sosialisasi/pemahaman kepada seluruh ASN lingkup Dinas Sosial tentang arti penting Peningkatan kapasitas kerja serta kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memberikan motivasi kerja melalui punishment and reward kepada setiap ASN yg berkinerja baik.

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Aplikasi E-Kinerja.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{9.288.610}{9.288.810} \times 100\% \\ &= 100\% - 99.99\% \\ &= 0.01\% \end{aligned}$$

Dari gambaran di atas diperoleh realisasi anggaran di indikator 1 ini sebesar 0.01% secara teori masih sangat efektif dalam hal efisiensi

## Indikator 2

### Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Tabel 3.8

Program/Kegiatan yang mendukung **Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA		
			K	Rp.	K	Rp.				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM								
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ Fungsional	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	80%		1,536,502,828		1,517,514,703	98.76%	18,988,125
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jmh orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang		1,535,663,838		1,516,675,713	98.76%	18,988,125
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jmh Dok. LK akhir tahun SKPD	1 Laporan		838,990		838,990	100.00%	
JUMLAH						1,536,502,828		1,517,514,703	98,76	18,988,125

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih rendahnya pengetahuan keilmuan tentang akuntabilitas keuangan yang benar
2. Penerapan Akuntabilitas Keuangan di setiap kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat umum / belum menyeluruh

## SOLUSI

Upaya Peningkatan kapasitas / kapalitas Pengelola Keuangan segera dilakukan baik berupa sosialisasi maupun bimtek keuangan

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{1,517,514,703}{1,536,502,828} \times 100\% \\ &= 100\% - 99,76\% \\ &= 1,24\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sindikator II ini sebesar 1,24% secara teori efisien.

## Indikator 3

Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Kondisi fasilitas pendukung layanan public khususnya di area layanan front office kondisinya sangat memprihatinkan/ kondisi atap gedung yg rubuh
2. Masih rendahnya komitmen pelayanan petugas layanan front office yang melayani langsung masyarakat.

## SOLUSI

Upaya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana segera dilaksanakan melalui usulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor pada rencana anggaran tahun depan

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{493,705,197}{522,298,722} \times 100\% \\ &= 100\% - 94,53\% \\ &= 5,47\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator III ini sebesar 5,61% secara teori masi efisien.

Tabel 3.9

Program/Kegiatan yang mendukung **Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder(IKM)**  
tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
				K	Rp.	K	Rp.		
1  A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,068,090,360	2,020,508,510	97.70%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	Jmh dok. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	9,288,810	9,288,610	100.00%	200	
	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah		Jmh Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8,114,860	8,114,660	100.00%	200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jmh lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LHK peny. Lap. Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	1 Laporan	636,000	636,000	100.00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jmh lap. Evaluasi kinerja PD	1 Laporan	537,950	537,950	100.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ Fungsional	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	80%	1,536,502,828	1,517,514,703	98.76%	18,988,125	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jmh orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang	1,535,663,838	1,516,675,713	98.76%	18,988,125	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jmh Dok. LK akhir tahun SKPD	1 Laporan	838,990	838,990	100.00%		

B	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	1 Laporan	795,000	795,000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah lap. Penatausahaan BMD pada SKPD	1 dokumen	795,000	795,000	100.00%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	persentase lap. Adm kepeg yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	636,000	636,000	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		jumlah dok. Pendataan dan pengolahan adm. kepeg	21 Dokumen	636,000	636,000	100.00%
D	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD	80%	193,664,366	183,637,090	10,027,276
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7 paket	1,827,000	1,827,000	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah paket peralatan dan perlengk. Ktr yang disediakan	37 paket	24,075,000	18,564,000	77.11%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah paket bhn logistik ktr yang disediakan	2 Paket	27,160,000	24,144,000	88.90%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah paket brg cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	8,365,366	6,865,090	82.07%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dok.bhn bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	1,440,000	1,440,000	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah lap. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81 laporan	130,797,000	130,797,000	100.00%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	Persentase tagihan jasa penunjang urusan perangkat daerah	80%	266,574,456	248,901,752	17,672,704
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah lap. Penyediaan jasa surat menyurat	1000 laporan	980,100	980,000	99.99%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		jumlah lap peny jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	6 laporan	45,454,356	42,186,752	92.81%
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr		jumlah lap peny jasa peralatan dan perlengk ktr	15 laporan	9,540,000	9,535,000	99.95%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah lap. peny jasa pelayanan umum ktr yang disediakan	18 laporan	210,600,000	196,200,000	93.16%
							14,400,000

<b>F</b>	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>persentase tertib ketatausahaan kantor</b>	<b>persentase pemeliharaan BMD pada perangkat daerah</b>	90%	60,628,900	59,735,355		893,545
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan		jmh kend perorangan dinas atau randis jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 unit	53,244,400	52,351,355	98.32%	893,045
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jmh gdg ktr dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabili tasi	3 unit	7,384,500	7,384,000	99.99%	500

Tabel 3.10

Program/Kegiatan yang mendukung **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik**  
**perangkat daerah**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
<b>1</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>persentase tertib ketatausahaan kantor</b>	<b>jmh administrasi barang daerah yang tersusun</b>	1 Laporan		795,000	795,000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jmh lap. Penatausahaan BMD pada SKPD	1 dokumen		795,000	795,000	100.00%
<b>B</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>persentase tertib ketatausahaan kantor</b>	<b>persentase lap. Adm kepeg yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu</b>	100%		636,000	636,000	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		jmh dok. Pendataan dan pengolahan adm. kepeg	21 Dokumen		636,000	636,000	100.00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jmh orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	25 orang		-		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>persentase tertib ketatausahaan kantor</b>	<b>Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD</b>	80%		193,664,366	183,637,090	10,027,276
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jmh Kom. Instalasi listrik/penerangan yg tersedia	7 paket		1,827,000	1,827,000	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jmh paket peralatan dan perlengk. Ktr yang disediakan	37 paket		24,075,000	18,564,000	77.11%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jmh paket bhn logistik ktr yang disediakan	2 Paket		27,160,000	24,144,000	88.90%



C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jmlh paket brg cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	8,365,366	6,865,090	82.07%	1,500,276
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jmlh dok.bhn bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	1,440,000	1,440,000	100.00%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jmlh lap. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81 laporan	130,797,000	130,797,000	100.00%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	Persentase tagihan jasa penunjang urusan perangkat daerah	80%	266,574,456	248,901,752		17,672,704
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jmlh lap. Penyediaan jasa surat menyurat	1000 laporan	980,100	980,000	99.99%	100
D	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		jmlh lap peny jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	6 laporan	45,454,356	42,186,752	92.81%	3,267,604
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr		jmlh lap peny jasa peralatan dan perlengk ktr	15 laporan	9,540,000	9,535,000	99.95%	5,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jmlh lap. peny jasa pelayanan umum ktr yang disediakan	18 laporan	210,600,000	196,200,000	93.16%	14,400,000
	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	persentase pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	90%	60,628,900	59,735,355		893,545
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan		jmlh kend perorangan dinas atau randis jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 unit	53,244,400	52,351,355	98.32%	893,045
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jmlh gdg ktr dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	7,384,500	7,384,000	99.99%	500
JUMLAH					522,298,722	493,705,197	94,53	28,593,525

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan kapasitas SDM demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat salah satu upaya nyata adalah dengan mengupayakan ketersediaan website OPD sehingga masyarakat umum dapat meng-akses layanan apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama ini. Upaya nyata tersebut dapat kita lihat diantaranya;

- Meningkatkan kualitas tata kelola kantor khususnya ketatausahaan persuratan, penggandaan penyediaan perlengkapan kantor serta sarana pendukung lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelayanan public yg berkaitan langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat / memberikan kemudahan akses serta penyediaan layanan dukungan kepada masyarakat saat berkunjung mengurus administrasi layanan sosial di Dinas Sosial seperti penyediaan ruangan merokok, taman bermain anak serta ruangan laktasi bagi ibu menyusui;

- c. Mengupayakan Rehabilitasi / Perbaikan sarana kantor yang sudah mulai termakan usia seperti perbaikan plafon, Atap yang bocor serta perbaikan sarana pendingin udara yang sudah tidak berfungsi maksimal serta mengupayakan pengadaan sarana olah data yang mumpuni sehingga Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
- d. Meningkatkan Kompetensi ASN yang tidak berlatar belakang pendidikan Ilmu Sosial dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk ikut Diklat Pelayanan Pekerja Sosial yang secara rutin dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Latihan BPKKS Makassar sehingga ASN yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di Bidang Sosial.



**SERBANEKA DOKUMENTASI KEGIATAN  
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT  
LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.11  
Realisasi Anggaran tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA	
			K	Rp.	K	Rp.			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,068,090,360	2,020,508,510	97.70%		
	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	Jmh dok. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	9,288,810	9,288,610	100.00%	200
		Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah		Jmh Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8,114,860	8,114,660	100.00%	200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jmh lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LHK peny. Lap. Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	1 Laporan	636,000	636,000	100.00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jmh lap. Evaluasi kinerja PD	1 Laporan	537,950	537,950	100.00%	
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ Fungsional	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	80%	1,536,502,828	1,517,514,703	98.76%	18,988,125
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jmh orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang	1,535,663,838	1,516,675,713	98.76%	18,988,125
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jmh Dok. LK akhir tahun SKPD	1 Laporan	838,990	838,990	100.00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	jmh administrasi barang daerah yang tersusun	1 Laporan	795,000	795,000		-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jmh lap. Penatausahaan	1 dokumen	795,000	795,000	100.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	persentase lap. Adm kepeg yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	636,000	636,000		-
	c	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		jmh dok. Pendataan dan pengolahan adm. kepeg	21 Dokumen	636,000	636,000	100.00%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jmh orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	-			-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase tertib ketatausahaan kantor	Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD	80%	193,664,366	183,637,090		10,027,276	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7 paket	1,827,000	1,827,000	100.00%	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			jmh paket peralatan dan perlengk. Ktr yang disediakan	37 paket	24,075,000	18,564,000	77.11%	5,511,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			jmh paket bhn logistik ktr yang disediakan	2 Paket	27,160,000	24,144,000	88.90%	3,016,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			jmh paket brg cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	8,365,366	6,865,090	82.07%	1,500,276	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jmh dok.bhn bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	1,440,000	1,440,000	100.00%	-	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah lap. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81 laporan	130,797,000	130,797,000	100.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	Persentase tagihan jasa penunjang urusan perangkat daerah	80%	266,574,456	248,901,752		17,672,704
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah lap. Penyediaan jasa surat menyurat	1000 laporan	980,100	980,000	99.99%	100
D	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		jumlah lap peny jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	6 laporan	45,454,356	42,186,752	92.81%	3,267,604
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr		jumlah lap peny jasa peralatan dan perlengk ktr	15 laporan	9,540,000	9,535,000	99.95%	5,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah lap. peny jasa pelayanan umum ktr yang disediakan	18 laporan	210,600,000	196,200,000	93.16%	14,400,000
	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tertib ketatausahaan kantor	persentase pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	90%	60,628,900	59,735,355		893,545
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan		jumlah kend perorangan dinas atau randis jabatan yang dipelihara dan dibayar	8 unit	53,244,400	52,351,355	98.32%	893,045
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gdg ktr dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	7,384,500	7,384,000	99.99%	500
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yg berdaya			28,399,982	28,396,388		
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	jumlah KK KAT yg mendapat fasilitas pemberdayaan sosial	Jumlah jiwa masyarakat KAT yang mendapatkn keg. Dayasos	1000 jiwa	8,462,080	8,462,080		
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah jiwa masyarakat KAT yang mendapatkn keg. Dayasos	1000 jiwa	8,462,080	8,462,080	100.00%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota	jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas peksos msy. kewenangan kab/kota	Jumlah kelompok penerima KUBE	36 kelompok	19,937,902	19,934,308		
A	Peningkatan kemampuan potensi Peksos Masy kewenangan kab/kota		jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas peksos msy. kewenangan kab/kota	20 orang	3,594		0.00%	
B	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota		jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	40 keluarga	19,934,308	19,934,308	100.00%	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yg ditangani dlm pelayanan rehsos			471,299,454	453,880,254		
3								

A	Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial	jumlah orang yg mendapatkn akses ke Layanan pendidikan dn kesehatan dasar kewenangan kab/kota	persentase PMKS yang tertangani dalam pelayanan rehsos	36.06%	382,560,386	365,151,186		
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		jumlah orang yg mendapatkn akses ke Layanan pendidikan dn kesehatan dasar kewenangan kab/kota	150 orang	382,560,386	365,151,186	95.45%	
B	Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	jumlah peserta dlm pemberian bimsos kpd kel PMKS lainnya bkn korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota	jumlah peserta dlm pemberian bimsos kpd kel PMKS lainnya bkn korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota	40 orang	88,739,068	88,729,068		
	Pemberian Bimsos kepada kpd kel. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial		jumlah peserta dlm pemberian bimsos kpd kel PMKS lainnya bkn korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota	40 orang	88,739,068	88,729,068	99.99%	
4								
A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase masy miskin penerima penjaminan sosial			444,786,208	312,324,408		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah klg yang mendapatkn pengentasan fm kab/kota	persentase masy miskin penerima penjaminan sosial	71.43%	444,786,208	312,324,408		
5								
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		persentase masy miskin penerima penjaminan sosial	71.43%	444,786,208	312,324,408	70.22%	
A	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yg ditangani			2,362,362,277	472,429,127		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dlm masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kab/kota	150 orang	2,362,362,277	472,429,127		
6								
	Penyediaan Makanan		jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kab/kota	150 orang	2,362,362,277	472,429,127	20.00%	Untuk beras (kemiskinan ekstrim) tidak terealisasi karena tidak tersedianya anggaran/dana untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Beras P3KE.
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase lembaga sosial pemberi layanan usaha kesos			24,212,000	24,212,000		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP kab/kota	jumlah TMP yang dikelola	2 lokasi	24,212,000	24,212,000		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota		jumlah TMP yang dikelola	2 lokasi	24,212,000	24,212,000	100.00%	
JUMLAH					5,399,150,281	3,311,750,687	61,34%	2,087,399,594



# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Tahun 2024 merupakan tahun yang memberikan tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial dalam pencapaian target kinerja tahunan, maupun pencapaian target kinerja 5 tahunan. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik dan lagi lagi berulang, hal ini tak mampu dihindari mengingat Pelaksanaan Program/ Kegiatan apapun itu tentu akan mampu diukur keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Dinas Sosial sebagai peng-ampu urusan Sosial dibebani target capaian SPM yang mampu setidaknya memberikan Pelayanan dan Penanganan Maksimal kepada Kelompok Rentan Lanjut Usia, Anak Luar Panti, Disabilitas serta Masyarakat Korban Bencana Alam Maupun Sosial dinilai belum berada di tingkat yang seharusnya. Isu strategis seperti capaian SPM, Penanganan Stunting serta Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga tahu ke-5 pelaksanaan RPJMD belum juga mampu memberikan dampak secara signifikan. Dan harapannya semoga di tahun yg akan datang Prioritas Anggaran lebih berpihak kepada isu-isu strategis yg dimaksud.

### B. Langkah Perbaikan kedepan

Berdasarkan pada pencapaian diatas, masalah prioritas yang memerlukan tindak lanjut segera adalah;

#### 1. Pencapaian Target SPM belum maksimal

Rencana Tindak Lanjut :


Dukungan anggaran yg memadai diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target SPM, khususnya pada penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng).

#### 2. Masih rendahnya capaian di Program Pemberdayaan Sosial

Sama hal nya denga tahun sebelumnya tingkat capaian di Program ini sangat rendah akibat sangat terbatasnya Pagu yg dialokasikan untuk Program ini. Hal ini tidak terlepas dari catatan bahwa Program tersebut bukan menjadi Prioritas utama mengingat program ini tidak menjadi capaian dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditambah lagi terjadi *Refocusing* anggaran yang sumber dananya melalui DBH Provinsi dan PAD.

Rencana Tindak Lanjut :

Penetapan Data Kemiskinan / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada ditingkat Desa / Kelurahan yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan sosial.



# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS SOSIAL**

Jl. H. Andi Depu Nomor 147 Polewali, Kode Pos 91313  
Telepon. 0428-21025 Faks. 0428-22948

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

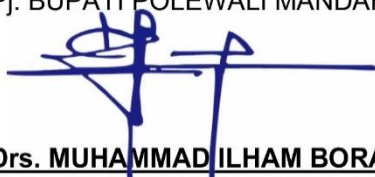
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

  
**Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS SOSIAL,

  
**H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19730711 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DINAS SOSIAL**

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	50,06%	42,82%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	39,82%	36.05%
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	20,08%	21.00%
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	90,03%	82.00%
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Predikat SAKIP perangkat daerah	<b>BB</b>	<b>BB</b>
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	100.00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,441,360,180	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	57,294,492	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	471,299,454	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	443,286,208	APBD
5	Program Penanganan Bencana	2,362,362,277	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	24,212,000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>5,799,814,611</b>	

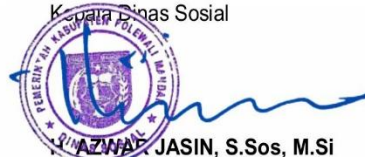
Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR



**Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP. 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Sosial



**AZWAN JASIN, S.Sos, M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19730711 199203 1 001

Pejabat			Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target														Kinerja(%)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah		
1	2024	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	persen	100												100	100	100.00	
2	2024	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas	predikat	Sangat Baik			Sangat Baik		Sangat Baik			Sangat Baik				Sangat Baik	99.99	99.99	
3	2024	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Ketahanan Sosial bagi Masyarakat korban Bencana	Persentase masyarakat korban Bencana yang tertangani	persen	100												100	100	100.00	
4	2024	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS Non Potensial	Persentase PMKS Non Potensial dan Masyarakat Korban Bencana yang memiliki ketahanan sosial	persen	71.43								57.19				34.65	91.84	128.57	
5	2024	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	persen	21.00															
6	2024	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	persen	36.05								35.40				48.67	84.07	233.20	

Pejabat	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target														Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah		
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya kualitas tata kelola taman makam pahlawan	Persentase kesiapan TMP dalam layanan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	persen	100						25			25			50	100	100.00	
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin	Optimalnya ketersediaan bantuan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	persen	100												100	100	100.00	
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	persen	71.43									57.19			34.65	91.84	128.57	
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya Keberdayaan PSKS, Kelembagaan Sosial dan PMKS Potensial	Persentase masyarakat miskin potensi yang berdaya	persen	71.43															
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kapasitas PMKS sasaran sebagai bekal kemandirian	Persentase PMKS yang tertangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	persen	36.05									35.40			48.67	84.07	233.20	



Pejabat	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pekerja Sosial	Optimalnya fungsi Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dikelola	unit	182									82			100	182	100.00
Pekerja Sosial 2	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yg ditangani	KK	150						11			30			38	79	52.67
Pekerja Sosial 1	Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang valid	Jumlah Data Rumah Tangga dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah yang valid	KK	71204									40727			24685	65412	91.87
Pekerja Sosial	Terlaksananya penyaluran bantuan stimulan	Jumlah Kelompok / Individu yg diberdayakan	orang	20														
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Bantuan Stimulan Dan Fakir Miskin	Meningkatnya kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Kelompok / Individu yg diberdayakan	KK	97														
Pekerja Sosial 2	Meningkatnya kemampuan dasar kecakapan hidup PMKS Luar Panti	Meningkatnya kemampuan dasar kecakapan hidup PMKS Luar Panti	orang	40												40	40	100.00
Pekerja Sosial 1	Tersedianya layanan Asesment dan Advokasi sosial lanjutan bagi PMKS Rentan	Jumlah PMKS di luar Panti yang menerima Pelayanan Sosial	orang	150									80			70	150	100.00

Polewali, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas



**H. Azwar Jasin, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19730711 199203 1 001



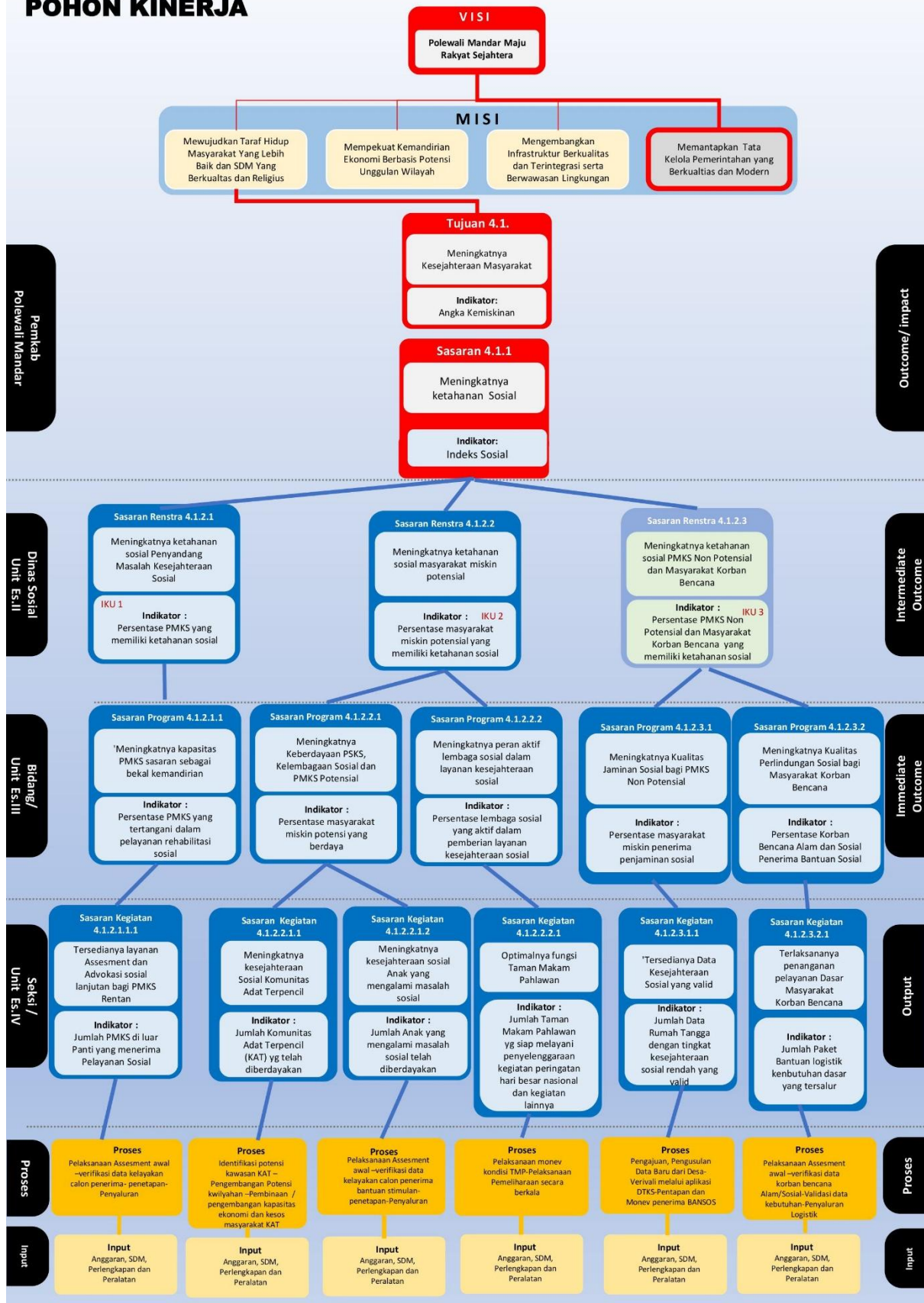
**PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR**  
**DINAS SOSIAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.399.150.281,00</b>	<b>3.311.750.687,00</b>	<b>61,34</b>	<b>9.757.541.969,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.288.724.851,00</b>	<b>3.301.325.257,00</b>	<b>62,42</b>	<b>9.635.235.969,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.535.663.838,00	1.516.675.713,00	98,76	1.574.927.659,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.753.061.013,00	1.784.649.544,00	47,55	7.356.338.310,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	703.970.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>5.288.724.851,00</b>	<b>3.301.325.257,00</b>	<b>62,42</b>	<b>9.635.235.969,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>110.425.430,00</b>	<b>10.425.430,00</b>	<b>9,44</b>	<b>122.306.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.425.430,00	10.425.430,00	100,00	122.306.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>110.425.430,00</b>	<b>10.425.430,00</b>	<b>9,44</b>	<b>122.306.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.399.150.281,00</b>	<b>3.311.750.687,00</b>	<b>61,34</b>	<b>9.757.541.969,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5.399.150.281,00)</b>	<b>(3.311.750.687,00)</b>	<b>61,34</b>	<b>(9.757.541.969,00)</b>

Polewali Mandar, Desember 2024  
Kepala Dinas Sosial

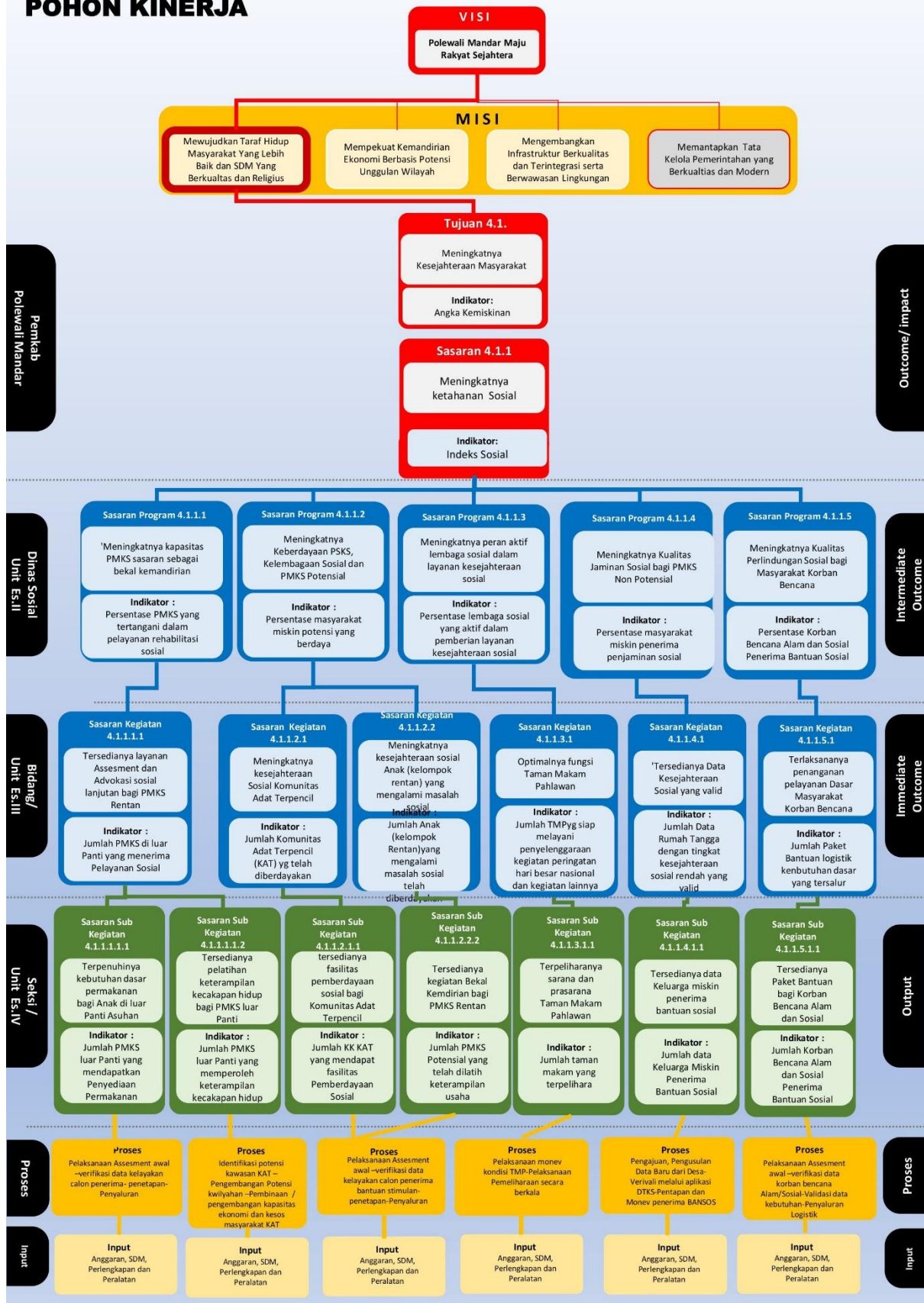
  
NIP. 197607111992031001

## POHON KINERJA

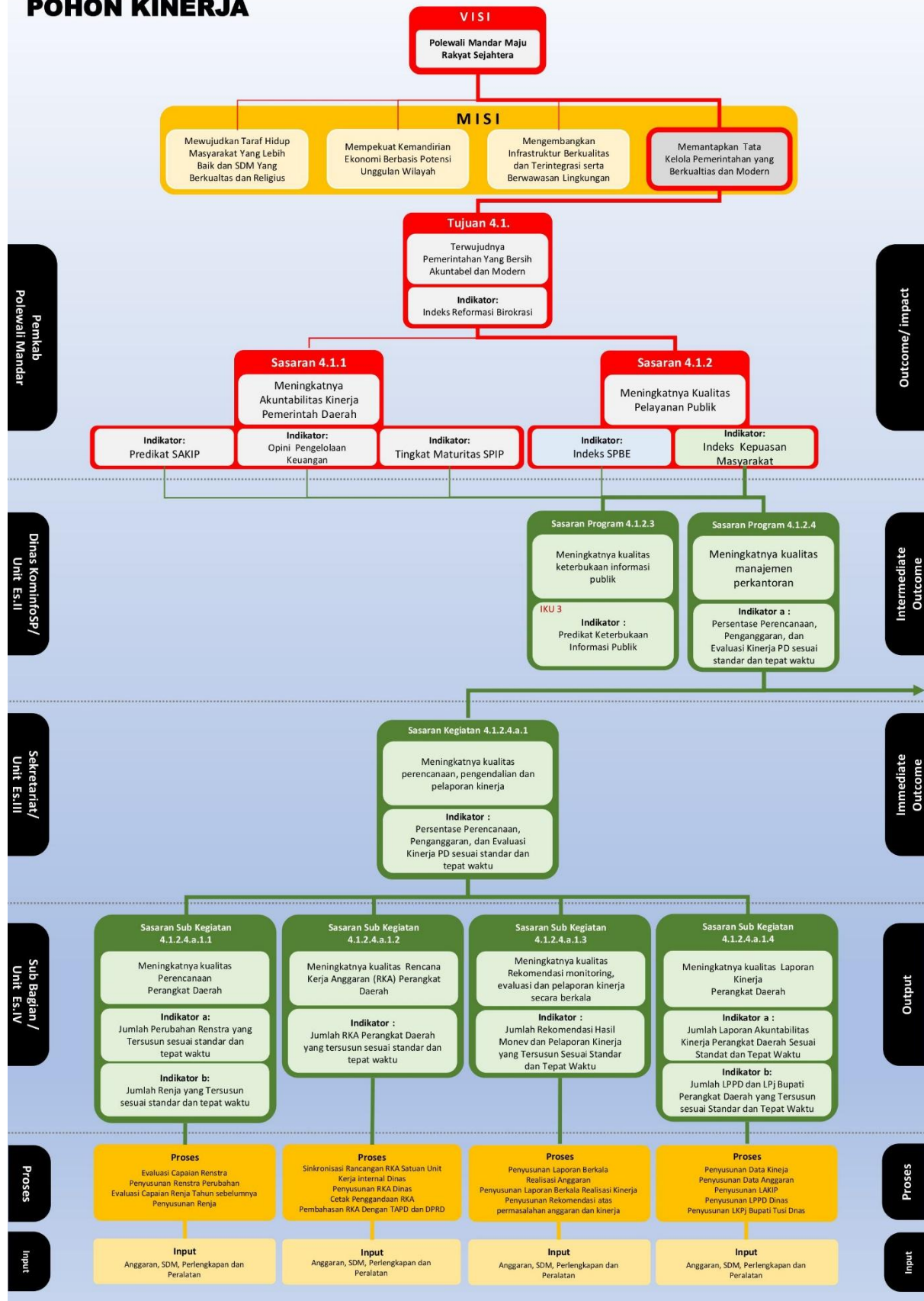




# POHON KINERJA

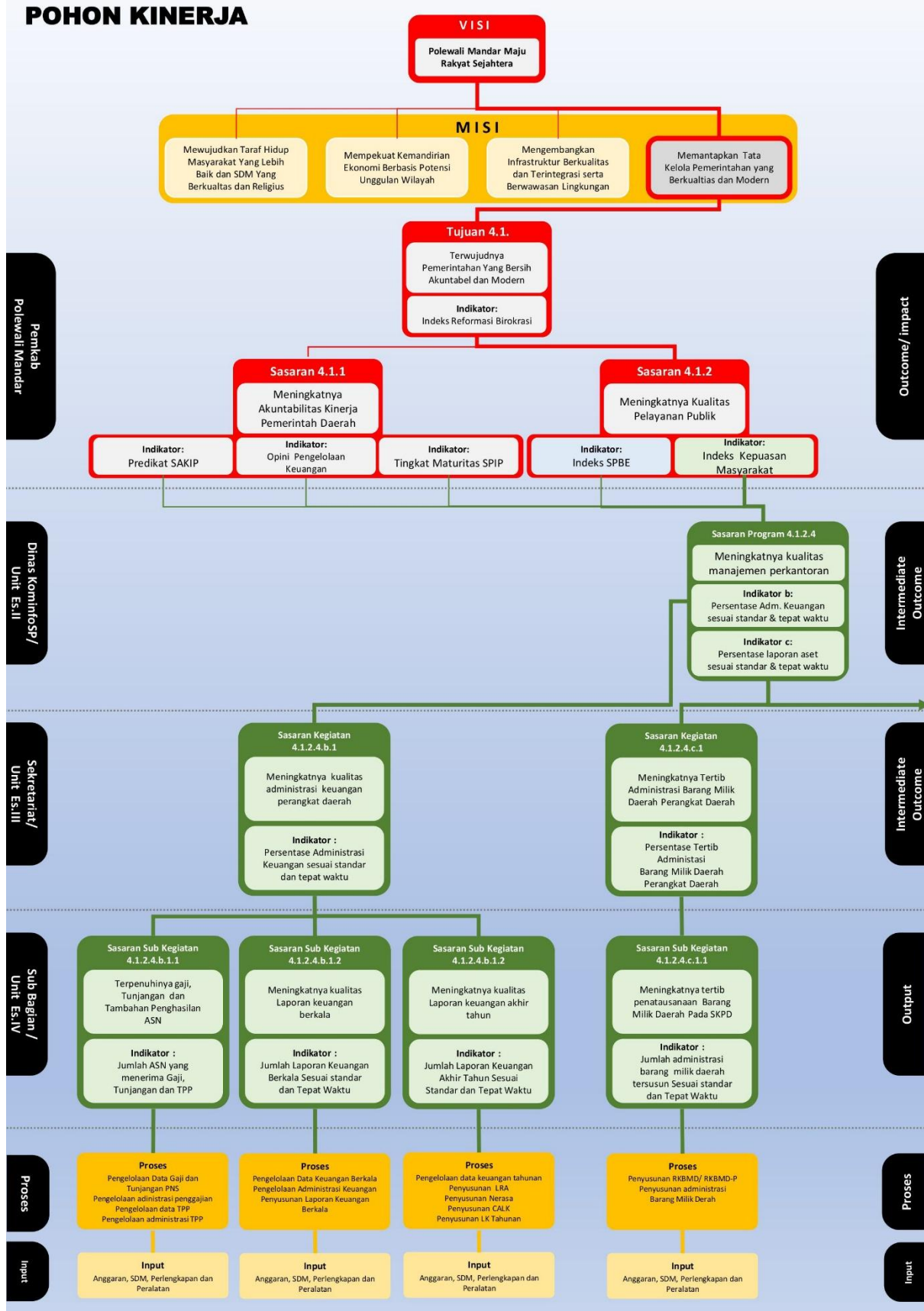


# POHON KINERJA

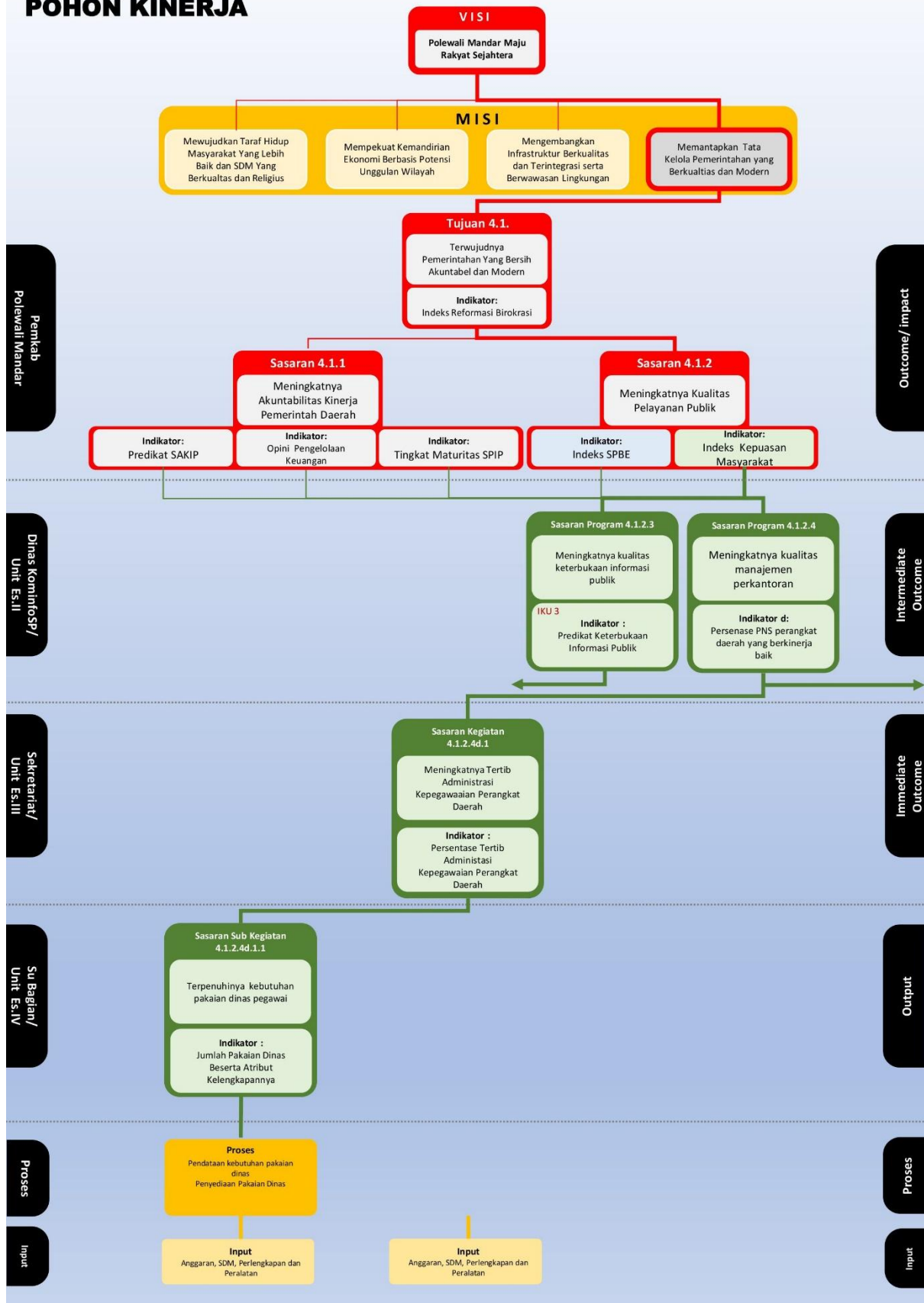




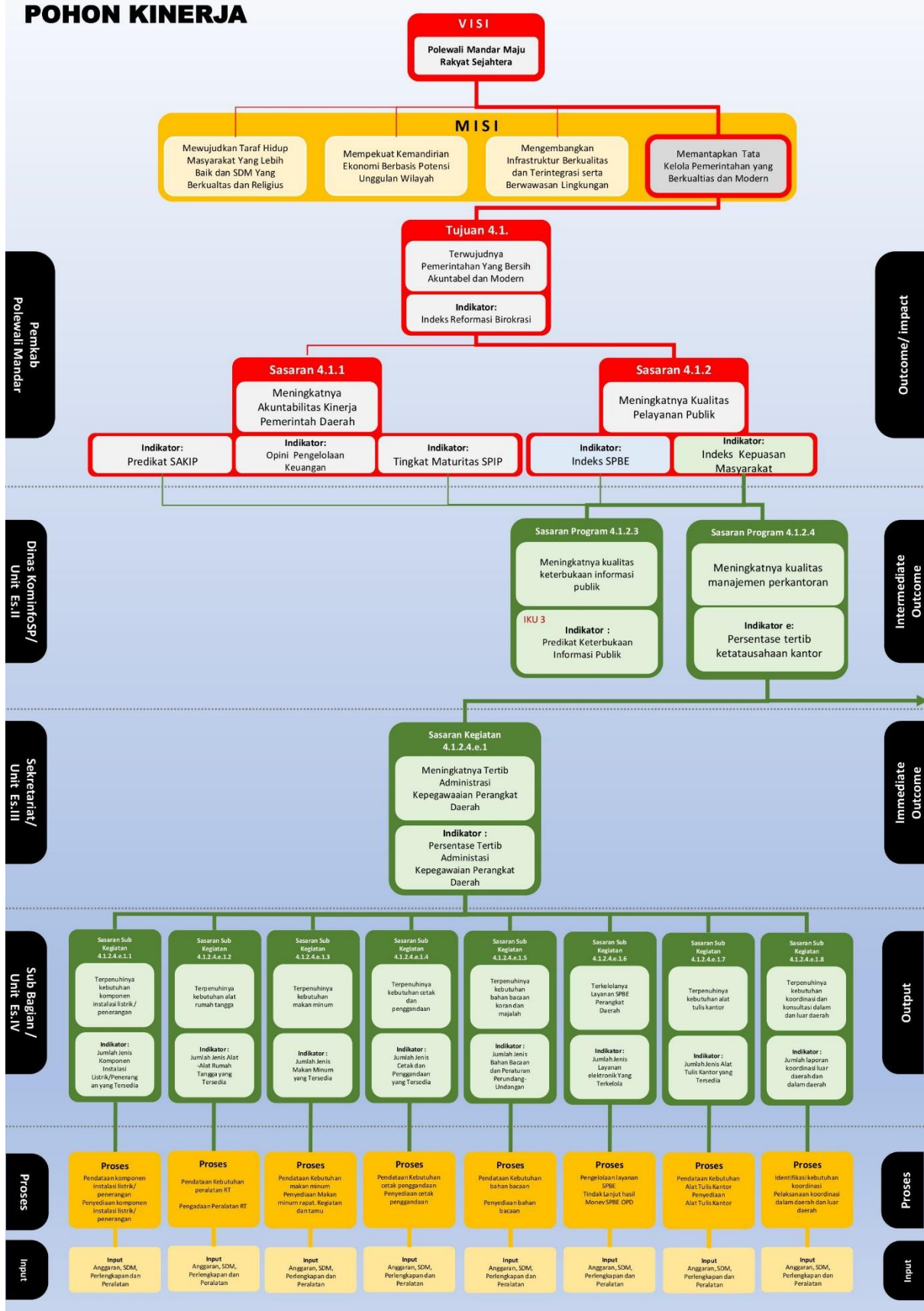
# POHON KINERJA



# POHON KINERJA

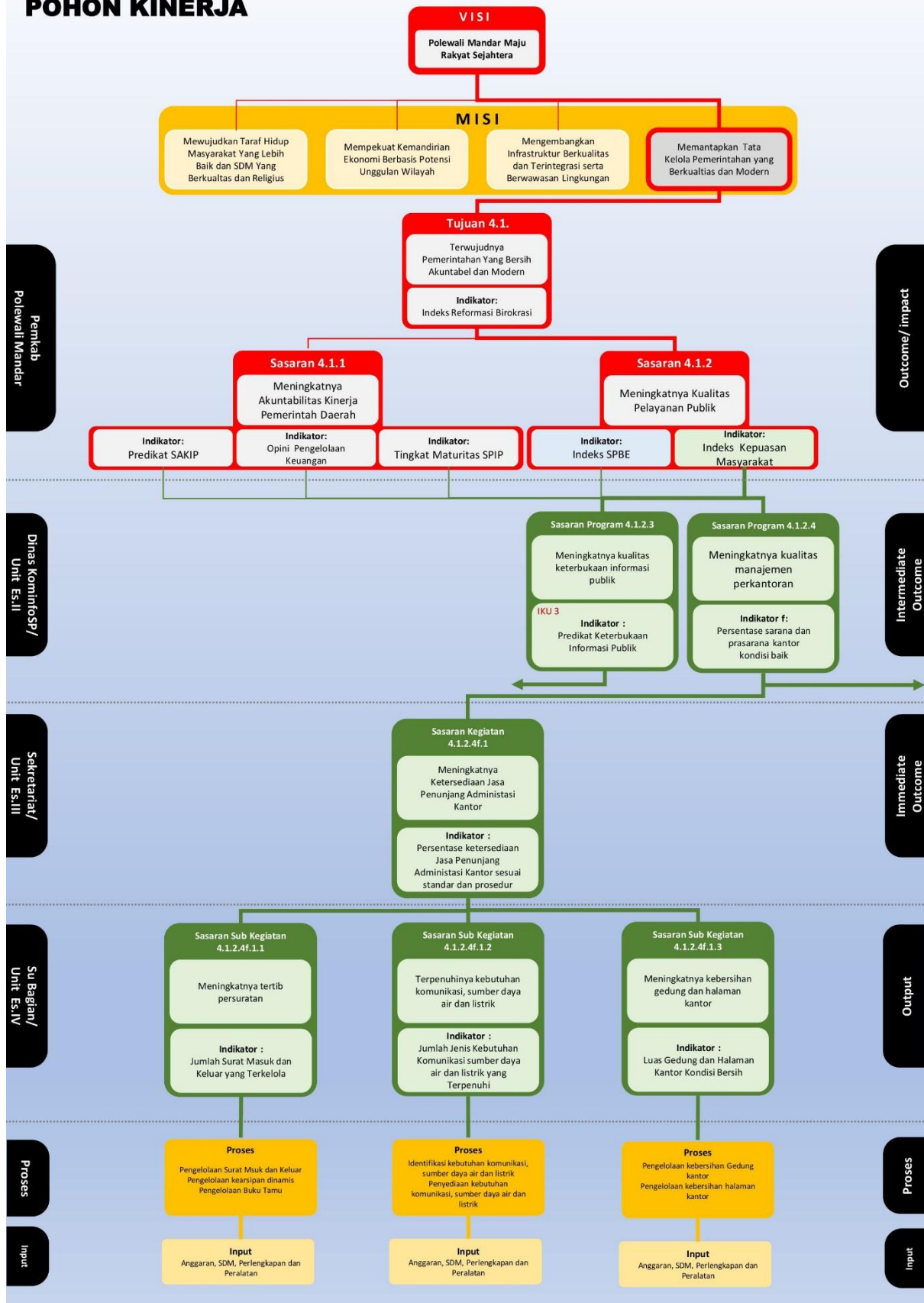


## POHON KINERJA

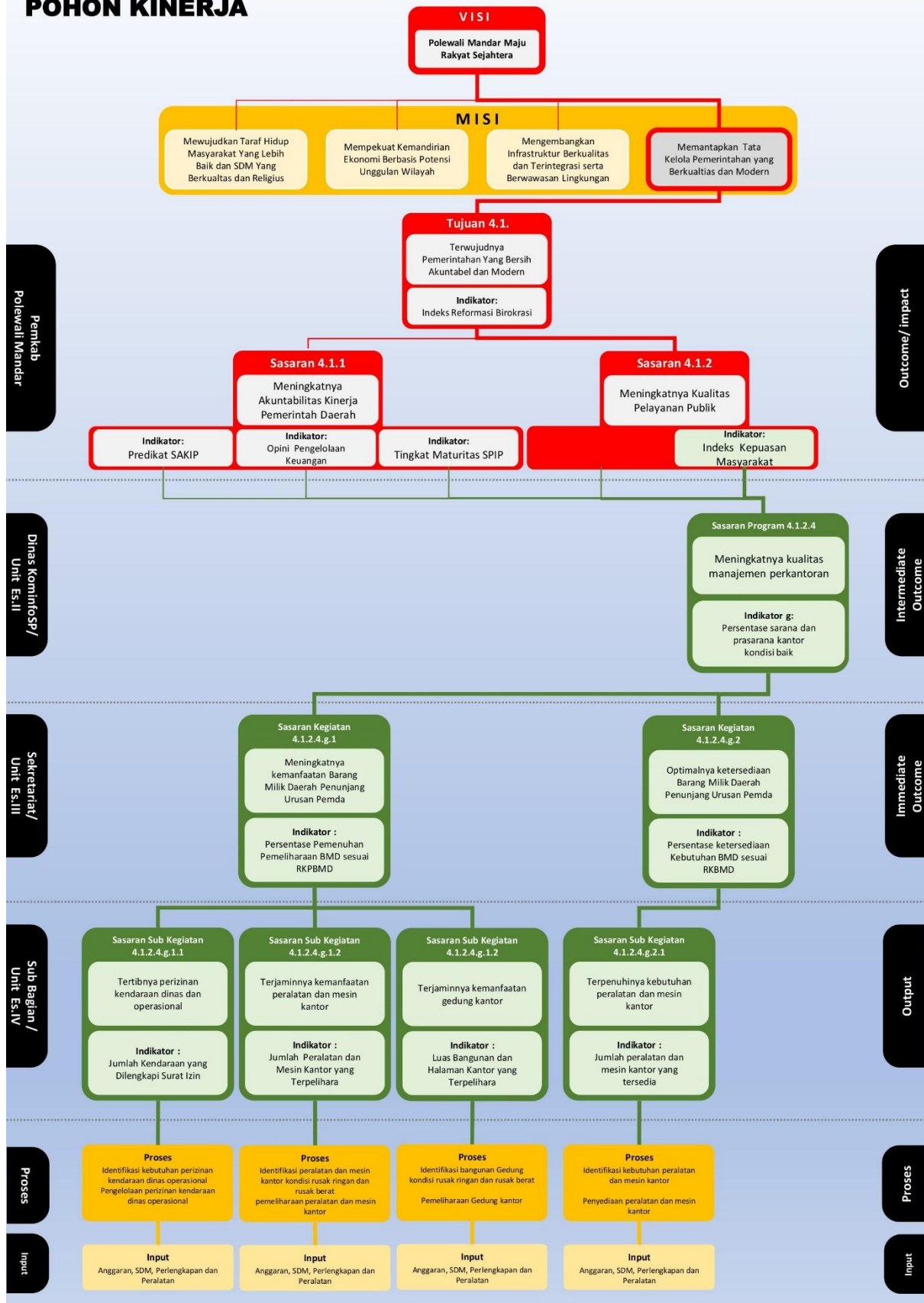




# POHON KINERJA



# POHON KINERJA





**MATRIKS CASCADING KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL**

[illegible]

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN  
RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
					4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		
1	2	3	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	15
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	BB	2,068,090,360	15.7%	324,792,950	48.7%	1,006,784,145	71.0%	1,467,887,232	97.70%	2,020,508,510	2,020,508,510	98%	97.70%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100	%	9,288,810	-					100.00%	9,288,610	9,288,610	100%	100.00%		
1.1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	8,114,860	-						8,114,660	3 Dokumen	8,114,660	100%	100.00%	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LHK peny. Lap. Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	1	Laporan	636,000	-						636,000	1 Laporan	636,000	100%	100.00%	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	537,950	-						537,950	1 Laporan	537,950	100%	100.00%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ Fungsional	100	%	1,536,502,828	21.1%	324,792,950	56.7%	871,062,789	77.7%	1,193,165,841	98.76%	1,517,514,703	1,517,514,703	99%	98.76%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jmh orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21	Orang	1,535,663,838	21.2%	324,792,950		871,062,789		1,193,165,841	1,516,675,713	21 Orang	1,516,675,713	99%	98.76%	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen LK akhir tahun SKPD	1	Laporan	838,990	-					100.00%	838,990	1 Laporan	838,990	100%	100.00%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100	%	795,000	-	100%	795,000	100.0%	795,000	100.00%	795,000	795,000	100%	100.00%		
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1	Dokumen	795,000	-		795,000		795,000		795,000	1 Dokumen	795,000	100%	100.00%	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100	%	636,000	-	100%	636,000	100.0%	636,000	100.00%	636,000	636,000	100%	100.00%		
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	21	Dokumen	636,000	-		636,000		636,000		636,000	21 Dokumen	636,000	100%	100.00%	
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang rang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	orang	-	-							25 orang				
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100	%	193,664,366	-	32.4%	62,749,000	53.6%	103,768,800	94.82%	183,637,090	183,637,090	95%	94.82%		
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	paket	1,827,000	-				1,827,000	100.00%	1,827,000	7 paket	1,827,000	100%	100.00%	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37	paket	24,075,000	-		2,549,000		8,475,000	77.11%	18,564,000	37 paket	18,564,000	77%	77.11%	
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	paket	27,160,000	-		7,452,000		13,302,000	88.90%	24,144,000	2 paket	24,144,000	89%	88.90%	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	jenis	8,365,366	-					82.07%	6,865,090	3 jenis	6,865,090	82%	82.07%	

5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	dokumen	1,440,000	-	480,000	480,000	100.00%	1,440,000	24 dokumen	1,440,000	100%	100.00%
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81	laporan	130,797,000	-	52,268,000	79,684,800	100.00%	130,797,000	81 laporan	130,797,000	100%	100.00%
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tertib ketatausahaan kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>266,574,456</b>	<b>-</b>	<b>21.2%</b>	<b>56,628,356</b>	<b>55.0%</b>	<b>146,580,261</b>	<b>93.37%</b>	<b>248,901,752</b>	<b>93%</b>	<b>93.37%</b>
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1000	laporan	980,100	-			99.99%	980,000	1000 laporan	980,000	100%	99.99%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang	6	laporan	45,454,356	-	9,378,356	16,580,261	92.81%	42,186,752	6 laporan	42,186,752	93%	92.81%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15	laporan	9,540,000	-			99.95%	9,535,000	15 laporan	9,535,000	100%	99.95%
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18	laporan	210,600,000	-	47,250,000	130,000,000	93.16%	196,200,000	18 laporan	196,200,000	93%	93.16%
7	<b>Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tertib ketatausahaan kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>60,628,900</b>	<b>-</b>	<b>24.6%</b>	<b>14,913,000</b>	<b>37.8%</b>	<b>22,941,330</b>	<b>98.53%</b>	<b>59,735,355</b>	<b>99%</b>	<b>98.53%</b>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau randis jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8	unit	53,244,400	-	14,913,000	18,707,330	98.32%	52,351,355	8 unit	52,351,355	98%	98.32%
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	7,384,500	-		4,234,000	99.99%	7,384,000	3 unit	7,384,000	100%	99.99%
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Masyarakat Miskin Potensial yg berdaya</b>	<b>22</b>	<b>%</b>	<b>28,399,982</b>	<b>-</b>	<b>33.3%</b>	<b>9,466,800</b>	<b>54.8%</b>	<b>15,550,788</b>	<b>99.99%</b>	<b>28,396,388</b>	<b>100%</b>	<b>99.99%</b>
1	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah KK KAT yg mendapat fasilitas pemberdayaan sosial</b>	<b>97</b>	<b>KK</b>	<b>8,462,080</b>	<b>-</b>	<b>3,222,400</b>	<b>75.5%</b>	<b>6,390,880</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,462,080</b>			
1.1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah jiwa masyarakat KAT yang mendapatkan kegiatan Dayasos	1000	jiwa	8,462,080	-	3,222,400	6,390,880		8,462,080	1000 jiwa	8,462,080	100%	100.00%
2	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Peksos masyarakat kewenangan kab/kota</b>	<b>20</b>	<b>orang</b>	<b>19,937,902</b>	<b>-</b>	<b>6,244,400</b>	<b>45.9%</b>	<b>9,159,908</b>	<b>99.98%</b>	<b>19,934,308</b>			
2.1	Peningkatan kemampuan potensi Peksos Masy kewenangan kab/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas peksos masyarakat kewenangan kab/kota	20	orang	3,594	-					20 orang			
2.2	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	40	keluarga	19,934,308	-	6,244,400	9,159,908		19,934,308	40 keluarga	19,934,308	100%	100.00%
III	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yg ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial</b>		<b>36.06%</b>	<b>471,299,454</b>	<b>-</b>	<b>7.4%</b>	<b>35,018,700</b>	<b>48.6%</b>	<b>229,277,137</b>	<b>96.30%</b>	<b>453,880,254</b>	<b>96%</b>	<b>96.30%</b>
1	<b>Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial</b>	<b>jmh orang yg mendapatkn akses ke layanan pendidkn dan kesehatan dasar kewenangn kab/kota</b>	<b>150</b>	<b>orang</b>	<b>382,560,386</b>	<b>-</b>	<b>26,361,300</b>	<b>50.8%</b>	<b>194,259,617</b>	<b>95.45%</b>	<b>365,151,186</b>			
1.1	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkn akses ke layanan pendidikan dn kesehatan dasar kewenangn kab/kota	150	orang	382,560,386	-	26,361,300	194,259,617		365,151,186	150 orang	365,151,186	95%	95.45%
2	<b>Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial</b>	<b>Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota</b>	<b>60</b>	<b>orang</b>	<b>88,739,068</b>	<b>-</b>	<b>8,657,400</b>	<b>39.5%</b>	<b>35,017,520</b>	<b>99.99%</b>	<b>88,729,068</b>			

2.1	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jumlah peserta dalam pemberian bimsos kepada keluarga PMKS lainnya bkn korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota	40	orang	88,739,068	-	8,657,400	35,017,520	88,729,068	40 orang	88,729,068	100%	99.99%				
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial		71.43%	444,786,208	-	41.7%	185,332,800	41.7%	185,332,800	70.22%	312,324,408	312,324,408	70%	70.22%		
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fm kab/kota	71204	keluarga	444,786,208	-		185,332,800		185,332,800		312,324,408			0.00%		
1.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial		71.43%	444,786,208	-		185,332,800		185,332,800		312,324,408	312,324,408	70%	70.22%		
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100	%	2,362,362,277	-	6.4%	151,478,480	8.5%	200,261,669	20.00%	472,429,127	472,429,127	20%	20.00%		
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dlm masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	150	Paket	2,362,362,277	-		151,478,480		200,261,669		472,429,127					
1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kab/kota	150	orang	2,362,362,277	-		151,478,480		200,261,669		472,429,127	150 orang	472,429,127	20%	20.00%	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase lembaga sosial pemberi layanan usaha kesos	100	%	24,212,000	-	48.5%	11,734,000	50.8%	12,304,000	100.00%	24,212,000	24,212,000	100%	100.00%		
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada TMP kab/kota	182	makam	24,212,000	-		11,734,000		12,304,000		24,212,000					
1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jumlah TMP yang dikelola	2	lokasi	24,212,000	-		11,734,000		12,304,000		24,212,000	2 lokasi	24,212,000	100%	100.00%	
JUMLAH					5,399,150,281	6.0%	324,792,950	25.9%	1,399,814,925	39.09%	2,110,613,626	61.34%	3,311,750,687	3,311,750,687			
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan													61%				
Predikat Kinerja																	

Polewali, Desember 2024

Kepala Dinas Sosial  
  
**H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19730711 199203 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
INSPEKTORAT**

Jl. Pameran Lingk. Batu-Batu, Kelurahan Darna - Kecamatan Polewali,  
Kabupaten Polewali Mandar, Kode Pos 91314  
Email : [inspektorat@polmankab.go.id](mailto:inspektorat@polmankab.go.id), Website: [Inspektorat.Polmankab.go.id](http://Inspektorat.Polmankab.go.id)

Polewali, 12 Juni 2024

Nomor : 047.16/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD  
Tahun 2023

Kepada

Yth. **Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Polewali Mandar**

di –  
Polewali

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial dengan tujuan:
  - a. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
  - b. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem AKIP;
  - c. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instans..



2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **78,88** atau memperoleh predikat rating **"BB"** (Sangat Baik). Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2023		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,80	30	28,80
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,63	25	20,63
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,51	15	11,51
d.	Evaluasi Internal	10	5,45	10	5,04
e.	Capaian Kinerja	20	12,50	20	12,50
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,88</b>	<b>100</b>	<b>78,47</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>

4. Nilai sebagai mana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Sosial telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat tujuan, sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Dokumen Renstra telah dijadikan sebagai acuan

penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan yaitu Renja, RKA, DPA dan Perjanjian Kinerja. Namun belum sepenuhnya dilakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan belum dilakukan revidi secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

- 2) Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.
- 3) Monitoring capaian target kinerja dalam rencana aksi belum dilakukan secara optimal dan capaian rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV dan telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Sosial telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Dinas Sosial telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang menggambarkan capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.

- 2) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga Laporan Kinerja belum dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta belum dapat digunakan untuk perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.
- 3) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan.
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja juga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.

d. Evaluasi Internal

Dinas Sosial telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatnya. Namun evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya, hanya sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidakberhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi hanya dilakukan periodik tahunan tidak dilakukan secara rutin minimal per triwulan sehingga melalui kegiatan evaluasi Rencana Aksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda;
- 2) Simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
- 3) Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda, sehingga terdapat alternatif yang diberikan;
- 4) Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda;

e. Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran dan kinerja Dinas Sosial dapat diketahui dari kinerja output dan outcome yang dilaporkan. Berdasarkan hasil output dan outcome yang dilaporkan tersebut menunjukkan bahwa target yang dapat dicapai hasilnya cukup memadai namun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi capaian-



capaian indikator outcome yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, maka kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan agar melakukan upaya perbaikan untuk setiap komponen, sub-komponen AKIP pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen Rencana Strategis untuk mengetahui apakah Renstra yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini dan jika ada kekeliruan dapat segera dilakukan perbaikan yang hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik untuk mendukung terciptanya inovasi kedepan;
  - b. Mengoptimalkan pengukuran kinerja dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
  - c. Memperkuat komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
  - d. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan;
  - e. Meningkatkan capaian target kinerja (*output*) dan (*outcome*) yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menghambat.

- f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar .

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Dinas Sosial.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

  
**INSPEKTUR KABUPATEN,**  
**H.AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19651231 20000 1 084



# **MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LAKIP TAHUN 2023**

## **DINAS SOSIAL**

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian	Evidence
1	Dinas Sosial telah menyusun rencana strategis (Renstra Tahun 2019-2024), dengan memuat tujuan, sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Dokumen Renstra telah dijadikan sebagai acuan penyusunan Dokumen Renstra telah dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan yaitu Renja, RKA, DPA dan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024	1 Dokumen	Juni 2023	Sekretariat	Telah dilaksanakan Reviu terhadap Renstra Tahun 2019-2024	<a href="#">RENSTRA\DINSOS RENSTRA PERUBAHAN 2019-2024 (2).pdf</a>
2	Dinas Sosial telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV dan telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdsarkan saran, indikator target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat	Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	1 Dokumen	Jnauari 2024	Sekertariat	Telah dilaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	<a href="#">OFFICE\IKU\IKU DINSOS 2024.pdf</a>

3	Dinas Sosial menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, laporan kinerja Dinas Sosial telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang menggambarkan capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini.	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023	1 dokumen	Desember 2023	Sekretariat	Telah dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023	<a href="#">LAKIP\LAKIP - 2023[1].pdf</a>
4	Dinas Sosial telah melakukan Evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Namun evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya	Penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja dan laporan Monev realisasi kinerja tahun berjalan	1 dokumen	Januari 2024	Sekretariat	Telah dilakukan penginputan kinerja secara berkala melalui e-SAKIP	<a href="#">PK Dinas Sosial 2024.pdf</a>
5	Meningkatkan capaian target kinerja (output) dan (outcome) yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan fakto-faktor yang menghambat	Penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV dan Rencana Aksi	1 dokumen	Januari 2023	Sekretariat	Telah dilakukan penyusunan penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	<a href="#">C:\Users\ASUS\Downloads\RENCANA AKSI DINSOS 2024 dan Monev Realisasi Kinerja.pdf</a>

6	Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Sosial	Matriks tindak lanjut hasil evaluasi LAKIP Tahun 2023 Dinas Sosial	1 laporan	Juli 2024	Sekretariat	Telah dilakukan pengisian matriks tindak lanjut hasil evaluasi LAKIP Tahun 2023	<a href="#">LHE LAKIP DINSOS 2024.pdf</a>

Polewali, 18 Juli 2024

Kepala Dinas Sosial



**H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 197307111992031001

